

**PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN
UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014 DI KOTA
BUKITTINGGI**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Pesyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Serjana Hukum**

Oleh:
RIZQY THAHABE
1110112199
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara



PEMBIMBING :

Dr. Yuslim, S.H., M.H

Hendria Fitriana, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2018

**PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN
UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014 DI KOTA
BUKITTINGGI**

**(Rizqy Thahabe, 1110112199, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 57 Halaman)**

ABSTRAK

Penyelenggara Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Bukittinggi di selenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi yang di amanatkan dalam Pasal 3 angka 6 Butir f Undang-Undang Republik Indonesia nomor 42 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014. Dalam proses Pemungutan suara pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2014 terjadi sebuah kesalahan prosedur sehingga dilaksanakan kembali pemungutan suara ulang di salah satu Tempat Pemungutan suara (TPS) 11 Kelurahan Cimpago Ipuh. Sedangkan dalam mejalankan pemilu ditegaskan Pelaksanaan dan asas Pemilu Presiden dan Wakil Presiden “secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil” diatur dalam Pasal 2 BAB 2 Undang-undang Republik Indonesia nomor 42 Tahun 2008. Dalam uraian diatas menjadi persoalan dalam penelitian ini : 1) Bagaimana pelaksanaan administrasi pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Bukittinggi? 2) Apa kendala dan upaya terhadap pelaksanaan administrasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Bukittinggi? Penelitian bersifat deskriptis analitis, pendekatan yuridis sosiologis, pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 1) pelaksanaan administrasi pemungutaan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Bukittinggi belum maksimal dalam rangkaian penyelenggaraan dalam pemungutan suara 2) kendala dan upaya terhadap pelaksanaan administrasi pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Bukittinggi dimana sistem rekrutmen, jumlah anggota menerima pelatihan dan penambahan biaya Operasional kurang memadai.